



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUSMARIZA
2. Jabatan : DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
3. NHK : 66552

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.995.865.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,  
HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.415.900.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/50 m2 di KAB / KOTA  
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 322.465.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA  
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 717.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 180.000.000

1. MOBIL, HONDA, BUKAN HARTA BARU, SDH LAPOR 2016 CRV  
Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 528.954.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 984.043.059

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.688.862.059

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 4.688.862.059

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.